

## **Analisis Rasio Keuangan Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus di Pemerintah Daerah Kabupaten Garut)**

**Eris Juliansyah<sup>1</sup>, Mauli Insaniyah<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Sosial Ekonomi – Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi

<sup>2</sup> Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Sosial Ekonomi – Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi

*Expenses22@gmail.com*

Received: 26.05.2023

Revised: 31.05.2023

Accepted: 05.06.2023

### **ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis Rasio Keuangan Daerah untuk mengukur kinerja pemerintah Kabupaten Garut. Metode Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif dengan metode atau teknik analisis data yang digunakan adalah analisis rasio keuangan daerah.*

*Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Garut dalam hal kemandirian masih sangat rendah hal tersebut disebabkan nilai PAD Kabupaten Garut dibandingkan dengan total pendapatan masih sangat kecil. Kabupaten Garut sebagaimana hasil analisis rasio ketergantungan menunjukkan adanya ketergantungan yang sangat tinggi terhadap pendapatan transfer atau dana perimbangan pusat. Tingkat desentralisasi Kabupaten Garut juga menunjukkan masih rendah sebagaimana ditunjukkan dengan angka rasio Derajat Desentralisasi Fiskal. Dalam pengelolaan keuangan daerah, Kabupaten Garut sudah efektif, dimana rasio efektivitas menunjukkan angka rasio mendekati 100%. Kabupaten Garut pada dasarnya memiliki kemampuan terus berkembang, dimana rasio pertumbuhan pendapatan garut pada nilai positif terkecuali tahun 2020 yang disebabkan oleh kondisi ekonomi secara nasional sebagai dampak wabah covid-19.*

***Kata Kunci : Rasio Keuangan Daerah, Kinerja Keuangan Daerah***

---

### **PENDAHULUAN**

Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Pemberian sumber keuangan Negara kepada Pemerintahan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal. Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan.

Pengelolaan keuangan dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada para pemangku kepentingan yang sudah menjadi tuntutan masyarakat. Semua penerimaan dan pengeluaran yang menjadi hak dan kewajiban Daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD. Dalam pengadministrasian Keuangan Daerah, APBD, Perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Komitmen Pemerintah dalam upaya mewujudkan laporan keuangan Pemerintah yang memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi, adalah dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2005[1], tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). SAP yang pertama masih menggunakan basis kas modifikasi belum berbasis akrual, karena menjadi masa transisi dari single entry menuju double entry. Berdasarkan PP 24 tahun 2005 [1]tersebut, Pemerintah Daerah masih diperkenankan untuk menggunakan basis kas modifikasi hingga lima tahun ke depan. Sehingga sesuai amanat PP tersebut diterbitkanlah Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 tahun 2010[2], tentang SAP. Melalui SAP terbaru tersebut Pemda mulai tahun 2011 diwajibkan menggunakan basis akrual dalam penyusunan laporan keuangan daerah. Adanya SAP menjadi era baru bagi perkembangan akuntansi sektor publik khususnya akuntansi pemerintah di Indonesia. Untuk menilai kinerja Pemda dalam mengelola keuangan daerahnya, antara lain adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap laporan keuangan Pemda.

Hasil analisis rasio keuangan selanjutnya dipergunakan sebagai tolak ukur dalam menilai [3] :

- 1) Kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan
- 2) Efisiensi dan efektivitas dalam merealisasikan pendapatan daerah
- 3) Sejauh mana aktivitas Pemda dalam membelanjakan pendapatan daerahnya.
- 4) Kontribusi masing-masing sumber pendapaan dalam pembentukan pendapatan daerah.
- 5) Pertumbuhan/perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Kinerja sebagai alat untuk mengukur kinerja atas pengelolaan keuangan organisasi yang dikaitkan dengan pusat pertanggungjawaban..

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah “gambaran mengenai tingkat pencapaian pengelolaan keuangan atas pelaksanaan suatu kegiatan program kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi pemerintah daerah” [4]. Kinerja keuangan dapat dinilai dengan menggunakan berbagai alat analisis berdasarkan tekniknya[5]. Kinerja keuangan dapat diukur dengan menggunakan rasio-rasio keuangan antara lain rasio profitabilitas[6].

Kinerja keuangan juga dapat didefinisikan sebagai penilaian subjektif dari kemampuan perusahaan untuk menggunakan asetnya berdasarkan bisnis utamanya untuk menghasilkan pendapatan[7].

Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk memenuhi 3 tujuan yaitu [8] :

- 1) Memperbaiki kinerja pemerintah daerah.
- 2) Membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan.
- 3) Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Pemerintah memiliki tanggungjawab dalam menjalankan pemerintahan, dan pembangunan masyarakat dan pelayanan terhadap masyarakat termasuk didalamnya bawa pemerintah memiliki tanggungjawab dalam menyampaikan laporan kinerjanya sebagai tolak ukur atau bentuk capaian yang telah dilakukan selama periode berjalan [9].

Hasil dari analisis rasio keuangan ini selanjutnya digunakan sebagai tolak ukur untuk [10]:

- 1) Melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.
- 2) Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.
- 3) Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya.
- 4) Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.
- 5) Melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

Analisis rasio terhadap APBD yang digunakan untuk menilai seberapa besar kemampuan keuangan daerah yang didapat melalui PAD untuk membiayai kegiatan-kegiatan daerahnya guna mencapai keberhasilan otonomi daerah.

1. Rasio Kemandirian Daerah

Menurut [11] “PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah”. PAD bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah. Sehubungan dengan hal di atas setiap daerah di harapkan mampu meningkatkan PAD untuk mencapai daerah yang mandiri.

Menurut [12] Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100$$

## 2. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Ketergantungan keuangan daerah menunjukkan besarnya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat (Susilawati et al. 2018). Rasio ini dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100$$

## 3. Derajat Desentralisasi Fiskal

Menurut Sistiana & Makmur (2014), derajat desentralisasi fiskal merupakan kemampuan daerah dalam kemandirian fiskal. Suatu daerah dikatakan layak menjadi daerah otonom bila salah satu syaratnya memiliki kemampuan pembiayaan yang berasal dari potensi yang dimilikinya sendiri.

Pengukuran derajat desentralisasi fiskal dilakukan dengan menggunakan pendekatan penerimaan, yaitu perbandingan pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah ( Marlina, 2014 ), dengan rumus:

$$\text{DDF} = \frac{\text{PAD}}{\text{TPD}} \times 100$$

Dimana:

DDF = Derajat Desentralisasi Fiskal

PAD = Pendapatan Asli Daerah tahun t

TPD = Total Penerimaan Daerah tahun t

## 4. Rasio Efektivitas Keuangan Daerah

Rasio efektivitas pendapatan dihitung dengan cara membandingkan realisasi pendapatan dengan target penerimaan pendapatan yang dianggarkan [9].

$$\text{Efektivitas Keuangan Daerah} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Target Pendapatan}} \times 100$$

Kemampuan keuangan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal 100%. Namun, semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan keuangan daerah semakin naik.

#### 5. Rasio Pertumbuhan Pendapatan

Rasio pertumbuhan ini mengukur seberapa besar tingkat kemampuan Pemda dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapainya dari periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapatkan perhatian.

$$\text{Efektivitas Keuangan Daerah} = \frac{\text{Realisasi PAD } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi PAD } X_{n-1}} \times 100$$

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan kuantitatif. Menurut Sugiyono [13] penelitian deskriptif adalah penelitian yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih. Melalui penelitian deskriptif maka dapat diperoleh deskripsi dari rumusan masalah yaitu mengenai analisis rasio keuangan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah.

Selanjutnya menurut Sugiyono [14] metode kuantitatif adalah metode yang berdasar filsafat positivisme bertujuan menggambarkan dan menguji hipotesis yang dibuat peneliti. Penelitian kuantitatif memuat banyak angka-angka mulai dari pengumpulan, pengolahan, serta hasil yang didominasi angka.

Variabel Penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan.

Dalam penelitian ini terdapat satu variabel atau disebut sebagai variabel tunggal. Menurut [15] variabel tunggal juga disebut dengan indeks tunggal. Indeks atau variabel tunggal

hanya membahas satu variabel saja. Adapun variabel yang diteliti adalah kinerja keuangan Kabupaten Garut.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder menurut [13], adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Adapun data yang digunakan yaitu data berupa laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Garut Tahun 2017 – 2021

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis rasio keuangan daerah yang terdiri dari:

#### 1. Rasio Kemandirian

Menurut Bagus Handoko, dkk (2019) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100$$

Tingkat kemampuan keuangan daerah adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 1  
Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

<b>Kemampuan Keuangan</b>	<b>Kemandirian (%)</b>	<b>Pola Hubungan</b>
Rendah sekali	0-25	Instruktif
Rendah	25-50	Konsultatif
Sedang	50-75	Partisipatif
Tinggi	75-100	Delegatif

Sumber : Halim (dalam Saputra & Fernando, 2017)

#### 2. Rasio Ketergantungan

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100$$

Hasil perhitungan rasio tersebut selanjutnya dibandingkan dengan rasio standar untuk menilai kinerja keuangan daerah sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2.  
Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah

No	Persentase	Kategori
1	0,00 – 10,00	Sangat Rendah
2	10,01 – 20,00	Rendah
3	20,01 – 30,00	Cukup
4	30,01 – 40,00	Sedang
5	40,00 – 50,00	Tinggi
6	> 50,01	Sangat Tinggi

Sumber : Tim Litbang Depdagri ( dalam Saputra & Fernando, 2017)

### 3. Derajat Desentralisasi Fiskal

$$DDF = \frac{PAD}{TPD} \times 100$$

Dimana:

DDF = Derajat Desentralisasi Fiskal

PAD = Pendapatan Asli Daerah tahun t

TPD = Total Penerimaan Daerah tahun t

Selanjutnya, rasio ini dapat dijelaskan dengan melihat skala interval yang ditemukan oleh tim KKPEE UGM (Hanafi dan Mugroho, 2009) dalam jurnal Sistiana & Makmur (2014)

, yaitu :

Tabel 3.3  
. Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal

No	DDF (%)	Kategori
1	0,00 – 10,00	Sangat Rendah
2	10,01 – 20,00	Rendah
3	20,01 – 30,00	Cukup
4	30,01 – 40,00	Sedang
5	40,00 – 50,00	Tinggi
6	> 50,00	Sangat Tinggi

#### 4. Rasio Efektivitas Keuangan Daerah

$$\text{Efektivitas Keuangan Daerah} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Target Pendapatan}} \times 100$$

Kemampuan keuangan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal 100%. Namun, semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan keuangan daerah semakin naik.

#### 5. Rasio Pertumbuhan Pendapatan

$$\text{Efektivitas Keuangan Daerah} = \frac{\text{Realisasi PAD } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi PAD } X_{n-1}} \times 100$$

Rasio pertumbuhan ini mengukur seberapa besar tingkat kemampuan Pemda dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapainya dari periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapatkan perhatian

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

#### 1. Analisis Rasio Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Garut

Sebagaimana penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya bahwa analisis rasio keuangan daerah dalam penelitian ini dianalisis menggunakan beberapa analisis rasio yaitu:

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
2. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah
3. Derajat Desentralisasi Fiskal
4. Rasio Efektivitas Keuangan
5. Rasio Pertumbuhan Pendapatan

#### Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Pengukuran rasio kemandirian dihitung berdasarkan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{PAD}} \times 100$$

---

 Total Pendapatan
**Tabel 4****Rasio Kemandirian Kabupaten Garut**

<b>Tahun</b>	<b>Rasio Kemandirian</b>	<b>Naik/Turun</b>	<b>Pola Hubungan</b>
2016	10,28		Instruktif
2017	15,65	5,37	Instruktif
2018	9,53	-6,13	Instruktif
2019	10,15	0,62	Instruktif
2020	10,55	0,41	Instruktif
2021	11,97	1,42	Instruktif

Tabel di atas menunjukkan bahwa rasio kemandirian Kabupaten Garut selama periode tahun 2016 – 2021 menunjukkan trend peningkatan setiap tahunnya kecuali tahun 2018 menurun sebesar 6,13%. Rasio ini menunjukkan kemampuan Daerah dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah dari total Pendapatan Daerah, dimana hasil analisis menunjukkan pola hubungan instruktif karena rasio berada antara 0 – 25%

**Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah**

Pengukuran rasio ketergantungan dihitung berdasarkan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100$$

Analisis perhitungan rasio ketergantungan pada periode tahun 2016 – 2021 dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 5****Rasio Ketergantungan Kabupaten Garut**

<b>Tahun</b>	<b>Rasio Ketergantungan</b>	<b>Naik/Turun</b>	<b>Kategori</b>
2016	65,89		Sangat Tinggi
2017	15,65	-50,24	Rendah
2018	61,04	45,39	Sangat Tinggi
2019	59,30	-1,74	Sangat Tinggi
2020	56,34	-2,96	Sangat Tinggi

2021	80,79	24,45	Sangat Tinggi
------	-------	-------	---------------

Tabel di atas menunjukkan bahwa rasio ketergantungan Kabupaten Garut selama periode tahun 2016 – 2021 menunjukkan trend naik turun, dimana penurunan di tahun 2017 sebesar 50,24% dari tahun 2016, penurunan di tahun 2019 sebesar 1,74% dari tahun 2018 dan pada tahun 2020 terjadi penurunan sebesar 2,96% dari tahun 2019. Sementara itu peningkatan terjadi di tahun 2018 sebesar 45,39% dan di tahun 2021 meningkat sebesar 24,45% dari tahun 2020. Rasio ini menunjukkan tingkat ketergantungan daerah atas penerimaan dari dana perimbangan pusat atau pendapatan transfer, semakin kecil rasio ketergantungan menunjukkan kemampuan daerah untuk tidak bergantung pada dana atau pendapatan transfer. Hasil analisa menunjukkan ketergantungan Kabupaten Garut rata-rata sangat tinggi karena nilai rasio  $> 50\%$

### Derajat Desentralisasi Fiskal

Analisis perhitungan Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) pada periode tahun 2016 – 2021 dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 6**

#### Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Garut

Tahun	DDF	Naik/Turun	Kategori
2016	10,28		Rendah
2017	15,65	5,37	Rendah
2018	9,53	-6,13	Sangat rendah
2019	10,15	0,62	Rendah
2020	10,55	0,41	Rendah
2021	11,97	1,42	Rendah

Tabel di atas menunjukkan bahwa Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Garut selama periode tahun 2016 – 2021 menunjukkan trend peningkatan setiap tahunnya kecuali tahun 2018 menurun sebesar 6,13%. Rasio ini menunjukkan kemampuan Daerah dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah dari total Pendapatan Daerah, dimana hasil analisa menunjukkan Kabupaten Garut tahun 2016, 2018, 2019, 2020 dan 2021 memiliki derajat desentrali fiskal rendah karena nilai rasio antara 10,01% – 20,00% dan tahun 2017 sangat rendah karena berada pada interval rasio 0,00% - 10,00%

### Rasio Efektivitas Keuangan Daerah

Pengukuran Rasio Efektivitas Keuangan Daerah dihitung berdasarkan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas Keuangan Daerah} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Target Pendapatan}} \times 100$$

Analisis perhitungan Rasio Efektivitas Keuangan Daerah pada periode tahun 2016 – 2021 dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 7**

#### Rasio Efektivitas Keuangan Daerah Kabupaten Garut

Tahun	Rasio Efektivitas	Naik/Turun	Keterangan
2016	93,26		Efektif
2017	97,66	4,40	Efektif
2018	98,63	0,97	Efektif
2019	99,26	0,63	Efektif
2020	98,06	-1,19	Efektif
2021	99,47	1,40	Efektif

Tabel di atas menunjukkan bahwa Rasio Efektivitas Keuangan Daerah berada pada nilai rasio antara 93,26% - 99,47%, semakin mendekati 100% rasio ini semakin efektif . Efektivitas keuangan daerah Kabupaten Garut paling rendah adalah 93,26% di tahun 2016 dan paling tinggi adalah 99,47%, sementara apabila dilihat naik turunnya dapat dilihat pada tabel di atas menunjukkan penurunan di tahun 2020 sebesar 1,19% dari tahun 2019. Rasio efektivitas keuangan Kabupaten Garut termasuk efektif karena hasil analisa menunjukkan rasio mendekati 100%

### Rasio Pertumbuhan Pendapatan Daerah

Pengukuran Rasio Pertumbuhan Pendapatan Daerah dihitung berdasarkan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan Pendapatan} = \frac{\text{Realisasi PAD } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi PAD } X_{n-1}} \times 100$$

Analisis perhitungan Rasio Pertumbuhan Pendapatan Daerah pada periode tahun 2016 – 2021 dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 8**  
**Rasio Pertumbuhan Pendapatan Kabupaten Garut**

<b>Tahun</b>	<b>Rasio Pertumbuhan</b>	<b>Naik/Turun</b>	<b>Keterangan</b>
2016	11,11		Positif
2017	38,84	27,72	Positif
2018	17,98	-20,86	Positif
2019	11,47	-6,51	Positif
2020	-6,22	-17,69	Negatif
2021	4,17	10,39	Positif

Tabel di atas menunjukkan bahwa Rasio Pertumbuhan Pendapatan Daerah menunjukkan kecenderungan menurun kecuali tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 20,86% dari tahun 2017, tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 17,69% dari tahun 2018 dan tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 17,69% dari tahun 2019. Selain itu dapat dilihat pada tabel 8 di atas menunjukkan rasio pertumbuhan bernilai negatif, hal ini terjadi karena Pendapatan Daerah tahun 2020 lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2019. Kabupaten Garut sebagaimana hasil analisa terhadap rasio keuangan pertumbuhan pendapatan memiliki pertumbuhan positif terkecuali di tahun 2020 menunjukkan pertumbuhan negatif atau penurunan

## **2. Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Garut**

Kinerja keuangan Kabupaten Garut berdasarkan rasio kemandirian masih berada di bawah 25%, oleh karena itu kinerja keuangan Kabupaten Garut sangat rendah berdasarkan rasio tersebut.

Kinerja keuangan Kabupaten Garut berdasarkan rasio ketergantungan menunjukkan bahwa Kabupaten Garut memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap pendapatan transfer yang berasal dari dana perimbangan pusat hal tersebut ditunjukkan dengan rasio ketergantungan > 50,01% kecuali tahun 2017 berada pada skor nilai 10,01% - 20,00% yang menunjukkan ketergantungan yang rendah

Kinerja keuangan Kabupaten Garut berdasarkan Derajat Desentralisasi Fiskal menunjukkan bahwa Kabupaten Garut masih rendah, artinya bahwa PAD Kabupaten Garut masih rendah dibandingkan dengan penerimaan Non PAD sebagaimana nilai rasio DDF berada pada interval rasio 10,01% - 20,00% dan sangat rendah di tahun 2018 karena nilai DDF berada pada interval rasio 0 – 10%.

Kinerja keuangan Kabupaten Garut berdasarkan Efektivitas Keuangan Daerah menunjukkan bahwa Kabupaten Garut memiliki tingkat efektivitas yang baik karena rasio efektivitas keuangan daerah berada pada rasio 93,26% - 99,47%, dimana kemampuan keuangan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal 100%. Namun, semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan keuangan daerah semakin naik.

Kinerja keuangan Kabupaten Garut berdasarkan rasio pertumbuhan pendapatan dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Garut memiliki kinerja keuangan yang relatif sudah baik atau positif walaupun di tahun 2020 mengalami penurunan atau pertumbuhan negatif yang disebabkan oleh pendapatan di tahun 2020 lebih kecil (<) dibandingkan tahun 2019, hal tersebut tentunya sebagai akibat bencana wabah covid-19

## **Pembahasan**

Berdasarkan hasil analisis rasio keuangan daerah yang telah dianalisis dengan menggunakan rasio kemandirian, rasio ketergantungan, derajat desentralisasi fiskal, rasio efektivitas dan rasio pertumbuhan pendapatan.

Kabupaten Garut dalam hal kemandirian masih sangat rendah. Kabupaten Garut sebagaimana hasil analisis rasio ketergantungan menunjukkan adanya ketergantungan yang sangat tinggi terhadap pendapatan transfer atau dana perimbangan pusat. Tingkat desentralisasi Kabupaten Garut juga menunjukkan masih rendah sebagaimana ditunjukkan dengan angka rasio Derajat Desentralisasi Fiskal. Dalam pengelolaan keuangan daerah, Kabupaten Garut sudah efektif, dimana rasio efektivitas menunjukkan angka rasio mendekati 100%. Sementara itu pertumbuhan pendapatan, Kabupaten Garut pada dasarnya memiliki kemampuan terus berkembang, dimana rasio pertumbuhan pendapatan garut pada nilai positif terkecuali tahun 2020 yang disebabkan oleh kondisi ekonomi secara nasional sebagai dampak wabah covid-19.

Hasil penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya yaitu hasil penelitian yang dilakukan oleh Fitriani Saragih dan Ilda Azilla Siregar (2020), hasil penelitian menunjukkan Rasio kemandirian yang masih sangat rendah. efektivitas PAD dikatakan sudah baik, rasio efisiensi dikatakan buruk karena Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi belum dapat menekan jumlah belanja daerahnya, rasio keserasian dikatakan buruk dan untuk tingkat rasio pertumbuhannya negatif, karena nilai Total Pendapatan Daerah (TPD), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Belanja Operasi semakin tinggi sedangkan nilai

Belanja Modal semakin rendah menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Tebing Tinggi belum mampu meningkatkan pertumbuhan daerahnya.

Sama halnya penelitian yang dilakukan oleh Salwa Qur'ani dan Endang Kartini Panggiarti (2021), menunjukkan bahwa rasio kemandirian 38,73% tergolong rendah / tidak mandiri, rasio efektivitas 110,85% tergolong efektif, rasio efisiensi 100,22% tergolong tidak efisien, rasio keserasian / aktivitas belanja tergolong tidak efisien. Rasio belanja operasional 87,16% dan rasio belanja modal 24,66% tergolong kurang harmonis, dan rasio pertumbuhan 10,16% tergolong rendah.

Persamaan serta perbedaan dengan hasil penelitian yang dilakukan Asri, Ghina Shinta Wulaning (2022), dimana hasil penelitian menunjukkan kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Cilacap sudah baik dilihat dari tanggapan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) BPK dengan beberapa poin yang harus dibenahi. Tingkat kemandirian Kabupaten Cilacap masih sangat rendah dan masih bergantung pada dana transfer. Tingkat efektivitas dan efisiensi PAD, Kabupaten Cilacap sudah sangat efektif dan efisien. Alokasi prioritas belanja untuk belanja operasi dan belanja modal sudah disesuaikan dengan aturan. Rasio pertumbuhan berdasarkan pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan belanja daerah mengalami pertumbuhan yang fluktuatif.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis rasio keuangan daerah yang telah dianalisis dengan menggunakan rasio kemandirian, rasio ketergantungan, derajat desentralisasi fiskal, rasio efektivitas dan rasio pertumbuhan pendapatan.

1. Kabupaten Garut dalam hal kemandirian masih sangat rendah hal tersebut disebabkan nilai PAD Kabupaten Garut dibandingkan dengan total pendapatan masih sangat kecil
2. Kabupaten Garut sebagaimana hasil analisis rasio ketergantungan menunjukan adanya ketergantungan yang sangat tinggi terhadap pendapatan transfer atau dana perimbangan pusat.
3. Tingkat desentralisasi Kabupaten Garut juga menunjukan masih rendah sebagaimana ditunjukan dengan angka rasio Derajat Desentralisasi Fiskal.
4. Dalam pengelolaan keuangan daerah, Kabupaten Garut sudah efektif, dimana rasio efektivitas menunjukan angka rasio mendekati 100%.

5. Kabupaten Garut pada dasarnya memiliki kemampuan terus berkembang, dimana rasio pertumbuhan pendapatan garut pada nilai positif terkecuali tahun 2020 yang disebabkan oleh kondisi ekonomi secara nasional sebagai dampak wabah covid-19.

### **Saran**

Selanjutnya penulis menyampaikan beberapa saran terkait hasil temuan dalam penelitian ini yang diantaranya adalah:

1. Kabupaten Garut dapat meningkatkan kemandirian dalam keuangan dengan mengoptimalkan PAD dengan cara melakukan pembenahan terhadap sumber-sumber pendapatan asli daerah
2. Kabupaten Garut dapat menurunkan ketergantungan terhadap pendapatan transfer atas dana perimbangan pusat jika PAD dapat dioptimalkan
3. Tingkat desentralisasi Kabupaten Garut dapat ditingkatkan dengan meningkatkan PAD secara optimal dengan melakukan efisiensi serta peningkatan produktifitas dana investasi pada Badan Usaha Milik daerah serta efektivitas pemungutan pajak daerah
4. Kabupaten Garut perlu terus meningkatkan efektivitas keuangan daerah dengan membuat perencanaan keuangan daerah yang realistis serta dapat direalisasikan agar rasio efektivitas meningkat
5. Kabupaten Garut pada perlu terus meningkatkan pendapatan dari tahun ke tahun untuk menunjukkan pertumbuhan pendapatan yang positif

### **REFERENSI**

- [1] Peraturan Pemerintah (PP), “Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2005, tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).” .
- [2] Peraturan Pemerintah, “Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.” .
- [3] Abdul Halim, *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*, Keempat. Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2012.
- [4] Mahsun, *Metode Penelitian Bahasa: Tahapan, Strategi, Metode, dan Tekniknya*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013.
- [5] H. Patandung, “Evaluasi Kinerja Keuangan Sebagai Salah Satu,” *J. Ekon.*, vol. 7, no. 2,

- pp. 1–9, 2021.
- [6] F. Suciati, “Analisis Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Pada Industri Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016,” *J. Ekon.*, vol. V, no. 2, pp. 51–70, 2019.
- [7] T. Setiatin, “Hubungan Antara Tanggungjawab Sosial Perusahaan dan Kinerja Keuangan Perusahaan: Pendekatan Tinjauan Literatur,” *J. Ekon.*, vol. 7, no. 3, 2021, [Online]. Available: <http://ejournal.stiepgri.ac.id/index.php/ekonomak/article/view/175%0Ahttp://ejournal.stiepgri.ac.id/index.php/ekonomak/article/download/175/112>.
- [8] Mardiasmo, *Perpajakan*, Edisi Revi. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2016.
- [9] M. S. Halim, A. & Kusufi, *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*, Edisi Kedu. Jakarta: Salemba Empat, 2014.
- [10] Mahmudi, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Edisi Ketu. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2019.
- [11] A. Halim, *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat, 2007.
- [12] B. Handoko, A. Pratama, and M. Sarah, “Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas Dan Rasio Efisiensi Pajak Daerah Terhadap Efisiensi Belanja Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten / Kota Di Sumatera Utara,” *Int. Stand. Ser. Number 2087 - 4669*, vol. 10, no. 1, pp. 1–14, 2019, [Online]. Available: <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1273472>.
- [13] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- [14] sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: CV Alfabeta, 2018.
- [15] Abuzar Asra, *1001 Soal Jawab Statistika Deskriptif*. Bogor: InMedia, 2017.